

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Permukiman adalah suatu wilayah atau area yang ditempati oleh beberapa individu atau kelompok manusia. Permukiman menjadi suatu kawasan yang terdiri dari perumahan yang fungsionalnya sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik ruang yang lengkap dengan lingkungan yang mendukung, sarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan hidup (A. R. Sari & Ridlo, 2021). Permukiman memiliki kaitan yang cukup erat dengan kondisi alam dan sosial kemasyarakatan sekitar (Nasution, 2019). Sehingga alam dan sosial semakin diperparah dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk menimbulkan keterbatasan lahan permukiman.

Perkembangan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kepadatan akan tempat tinggal, terutama di kalangan masyarakat urban. Akibatnya, terbentuklah lingkungan yang dikenal sebagai permukiman kumuh di wilayah perkotaan (Heldayani & Utomo, 2022). Urbanisasi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan kota, terutama dalam hal peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat pesat, khususnya di daerah perkotaan. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan permukiman kumuh (K. Putri & Ridlo, 2023). Perkembangan urbanisasi yang pesat di perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh akibat ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan infrastruktur yang tersedia.

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian yang memiliki permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan penduduk, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (G. T. Putri et al., 2023). Permukiman kumuh tidak hanya ditandai oleh kondisi lingkungan yang tidak layak, tetapi juga mencerminkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang dialami oleh penduduknya, terutama di kawasan perkotaan (Ahaliki, 2020). Namun, pada kenyataannya tidak semua orang bisa merasakan lingkungan yang layak, terutama mereka yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Permukiman yang bersih dan nyaman menjadi keinginan dari semua orang, baik itu masyarakat kelas atas maupun masyarakat menengah kebawah (Mardiansyah, 2020).

Peningkatan jumlah penduduk ini mendorong kebutuhan akan hunian yang layak, namun perbedaan daya beli masyarakat menyebabkan munculnya berbagai jenis permukiman, termasuk permukiman kumuh dan permukiman liar. Permukiman kumuh umumnya ditandai dengan kondisi lingkungan yang kurang layak, seperti rumah-rumah yang berdempetan, sistem drainase yang tidak memadai, serta kurangnya fasilitas sanitasi. Sementara itu, permukiman liar lebih berkaitan dengan status legalitas lahan, di mana rumah dibangun di area yang seharusnya tidak digunakan sebagai tempat tinggal, seperti di bawah jembatan atau di lahan terlarang lainnya (Sema, 2019).

Palembang, sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan, menghadapi masalah permukiman akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, Salah satu tantangan utama adalah munculnya

wilayah kumuh di berbagai lokasi. Daerah yang termasuk wilayah kumuh di Kota Palembang antaranya Seberang Ulu I dan II Banyak rumah di bantaran Sungai Musi dalam kondisi tidak layak huni, 7 Ulu dan 10 Ulu Wilayah padat penduduk dengan sanitasi buruk dan minim infrastruktur, Kertapati Banyak rumah semi permanen dengan akses terbatas ke air bersih dan drainase yang buruk, Plaju Permukiman tidak teratur dengan lingkungan yang kurang sehat, dan Ilir Timur dan Ilir Barat ada Beberapa kawasan memiliki permukiman padat, jalan sempit, dan drainase yang buruk (Oktarini et al., 2022). Lebih jauh, pertumbuhan kota Palembang memiliki tantangan tersendiri karena lonjakan permintaan perumahan telah mendorong pembangunan ke daerah lahan basah (Heldayani & Bachri, 2024). Dan juga Palembang merupakan daerah yang secara umum memiliki topografi dataran rendah (Oktavia & Heldayani, 2019).

Mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) sejak tahun 2018 dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman agar lebih layak huni. Setelah tujuh tahun berjalan, program ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Untuk menilai sejauh mana keberhasilannya, dilakukan studi kasus di Kelurahan 35 Ilir guna mengetahui dampak nyata program ini terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut (Suhel & Asngari, 2021).

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU). Program ini bertujuan untuk mengurangi permukiman kumuh di seluruh Indonesia,

termasuk di RT 23, RW 06, Kelurahan 35 Ilir atau bisa dikenal dengan sebutan daerah Tangga Buntung. Sebagai kawasan yang sebelumnya dikategorikan kumuh berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Dengan adanya program KOTAKU, kualitas lingkungan di wilayah ini mengalami perbaikan yang signifikan (Halvorsen, 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan di Kota Sukabumi mengenai program KOTAKU menunjukkan bahwa program ini berhasil memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya kenyamanan warga yang tinggal di kawasan kumuh berkat pembangunan sarana dan prasarana yang lebih layak. Namun, di beberapa aspek, program ini masih menghadapi tantangan yang menyebabkan hasilnya belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pelaksanaan program ini bisa berupa keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, atau kendala dalam koordinasi antara pihak terkait (Saleh, 2021).

Agar permasalahan permukiman kumuh tidak terlalu luas perlunya mengetahui persepsi masyarakat tentang permukiman kumuh sehingga dari persepsi itu bisa diarahkan penanganan yang lebih tepat. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Palembang”**.

## **1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Panduan awal supaya penelitian ini tidak melenceng dengan tujuan penelitian, maka perlunya memiliki fokus dan sub fokus, sebagai berikut:

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih terarah terfokus dan tidak meluas maka pada penelitian ini membatasi fokus penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut ini:

- a) Tipe penelitian ini adalah studi kasus, kasusnya kelurahan 35 ilir, Kota Palembang.
- b) Persepsi masyarakat merupakan tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya salah satunya sebagai program KOTAKU.

### **1.2.2 Sub Fokus**

Pada permasalahan fokus penelitian diatas maka cakupan subfokus penelitian adalah berfokus pada persepsi masyarakat terhadap tanggapan masyarakat dengan adanya program KOTAKU yang salah satunya sudah berlangsung di Kelurahan 35 Ilir Kota Palembang.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi masyarakat tentang program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Palembang?”.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kota Palembang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.5.1 Manfaat Secara Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai penerapan ilmu geografi yang dipelajari oleh peneliti khususnya dalam bidang mata kuliah geografi permukiman.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan pola permukiman yang tepat dalam serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **a. Bagi Peneliti**

Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pembelajaran yang telah di dapat dibangku kuliah serta memberikan kontribusi pemikiran peneliti dalam bidang geografi khususnya mata kuliah geografi permukiman.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan bagi masyarakat setempat.

#### **c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengelola permukiman disepanjang sungai dengan lebih baik berdasarkan data dan fakta.